

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Arto, H.A. Murti, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kedelapan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiono, Harlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bungin, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erni, Daly, 2008, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim Pada Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Makara, Moh. Taufik 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Manullang, E. Fernando dan Antonius Cahyadi, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lyberti, Yogyakarta

- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian; Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Lubis, Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta
- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung
- S. P., Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1209)

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Tahun 2005

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, Tahun 2015

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris, Banten, Tahun 2015.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang diperluas, Balikpapan, Tahun 2017.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

C. Tesis, Jurnal, Makalah dan lain-lain

Alwesius, 2017, Ketentuan Mengenai Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris, Bukan Merupakan Pembatasan Pembuatan Akta Bagi Notaris, Makalah.

Angraini, Ria Tri, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kota Tangerang Selatan”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Gautama, Primanda Furry, “Implementasi Sanksi Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman”, *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

D. Majalah

Rambe, Bahrun “Milad INI dan Pembatasan Akta”, *Renvoi*, Nomor 2.170.XV, Juli 2017.

E. Internet

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), <https://ini.id/sejarah.php>, diakses pada Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 18.21 WIB.

Formasi Jabatan Notaris, <https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018, Pukul 14.21 WIB.

Badan Statistik DY, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2018/02/01/109/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-terdaftar-menurut-jenisnya-di-d-i-yogyakarta.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018, Pada Pukul 19.45 WIB.

F. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Arry Supratno selaku Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, pada tanggal Kamis, 12 Oktober 2017.

Hasil Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta, pada tanggal Kamis, 11 Januari 2018

Hasil Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, pada tanggal Senin, 22 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta TSWG, pada tanggal Selasa, 30 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta DK, pada tanggal Selasa, 30 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta MFJSY, pada tanggal Selasa, 30 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Budi Hartono, selaku Majelis Pengawas daerah Kota Yogyakarta, pada tanggal, 31 Januari 2018

Hasil Wawancara dengan Rasyid selaku Perwakilan MPD Kanwil Kemenkumham Kota Yogyakarta, pada tanggal Rabu, 31 Januari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta TSJ, pada tanggal Jumat, 2 Februari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta M, pada tanggal Selasa, 6 Februari 2018.

Hasil Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta BHS, pada tanggal Kamis, 8 Februari 2018.